

Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMA Negeri 1 Watubangga

Kurnianti¹, Arafat², Ahmad Farouq Mulku Zahari³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

e-mail: kurnianti025@gmail.com, afatpascaunm@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PPK telah memberikan dampak positif, terutama dalam penurunan kasus perundungan dan peningkatan sikap siswa, meskipun implementasinya belum merata dan masih bersifat parsial. Efisiensi tercapai melalui optimalisasi sumber daya internal tanpa penambahan anggaran baru. Namun, perencanaan yang kurang matang dan keterlibatan orang tua yang minim menjadi kendala. Dari segi kecukupan dan kesetaraan, program belum menyentuh seluruh lapisan siswa secara merata dan cenderung lebih berfokus pada siswa yang aktif. Responsivitas dan ketepatan program dinilai belum optimal oleh siswa dan orang tua karena kurangnya komunikasi dua arah dan adaptasi terhadap kebutuhan nyata. Secara keseluruhan, program PPK di SMA Negeri 1 Watubangga menunjukkan fondasi pelaksanaan yang baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kolaborasi dengan orang tua, peningkatan komunikasi, serta pelaksanaan kegiatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, guru BK, guru agama, siswa, dan orang tua siswa. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan, dan ketepatan.

Kata kunci: Efektivitas Program Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Karakter.

PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Indonesia) mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan kebudayaan dengan tujuan untuk membimbing peserta didik didalam pribadinya, agar didalam pribadinya dan dampak lingkungannya. Seseorang mendapat kemajuan dengan hati yang tulus menuju kearah yang berakhlak. Kemudian yang dimaksud dengan akhlak ialah jenjang tertinggi yang diperoleh oleh seseorang yang berproses sewaktu hidupnya. Artinya dalam usaha mendapatkan jati diri atau karakter seseorang maka akhlak kemanusiaan merupakan jenjang yang teratas (Suwahyu, 2018).

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilannya diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Willis (2005:87), beliau mengatakan kenakalan remaja bukan lagi hal lumrah. Kenakalan remaja pada setiap angkatan berbeda-beda karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar dan karakter masyarakat dilingkungan itu. Dijaman sekarang kasus kenakalan remaja mulai beragam dari masalah bolos sekolah, pencurian, pelecehan seksual bahkan samapi

kekasus pembunuhan. Di usia mereka yang seharusnya aktif dengan jadwal kegiatan sekolah yang bersifat positif. Akan tetapi sebagian peserta didik lebih menyibukkan diri dengan kegiatan yang bersifat negatif yang bisa saja merugikan diri mereka sendiri atau bahkan orang lain. Masalah kenakalan remaja, terutama remaja sekolah yang sedang duduk dibangku sekolah tidak hanya membuat keresahan pada orang tua maupun pada lingkungan masyarakat, tetapi juga guru merasa keresahan akibat kenakalan remajah di lingkungan sekolah. Kenakalan para siswa tidak hanya semata-mata masalah tentang orang tua dan masyarakat. Tetapi masalah juga terhadap sekolah karena sekolah juga merupakan instansi pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam perolehan pendidikan yang didalamnya ada karakter siswa tersebut (Suryawan, 2016)

Pendidikan karakter merupakan bukan suatu hal yang baru di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama dan menjadi suatu budaya bagi bangsa. Kemajuan suatu ilmu pengetahuan menyebabkan tergesernya karakter bangsa dan karakter seorang siswa pada umumnya. Banyak kejadian kenakalan remaja yang terkadang cenderung kearah kriminalitas. Oleh karena itu, peran lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah lebih diperhatikan (Rifma, 2020).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan bahwa karakter adalah sebuah sifat, akhlak, dan kepribadian seseorang yang dibentuk dari gabungan sebagai suatu kebajikan yang dipercaya dan dimanfaatkan sebagai arahan untuk melihat, berfikir, bersikap dan bertindak. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan yang meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa pada seorang peserta didik, yang pada akhirnya mereka memiliki nilai-nilai dan karakter didalam dirinya. Menerapkan nilai-nilai dan karakter yang tertulis di atas didalam diri peserta didik itu sendiri sebagai masyarakat dan warga negara yang mempunyai sifat keyakinan, semangat kebangsaan, dan nilai yang bermanfaat serta memiliki inovasi yang luas (Elisanti, 2021)

Pendapat lain mengenai pendidikan karakter dikemukakan oleh Setiawan (2021) beliau mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang diberi oleh orang tua, guru maupun kepala sekolah. Mereka semua berperan penting pendidikan karakter kepada peserta didik maupun anak mereka sendiri. Pendidikan karakter bukan hanya bisa diterapkan disekolah, tetapi pendidikan karakter dapat di terapkan di lingkungan keluarga yaitu orang tua yang menerapkan kepada anaknya untuk tidak bertindak ke hal-hal yang berbau negative, karena pada saat ini peserta didik bisa secara langsung melihat dibeberapa platform seperti tv, hp dan lainnya.

Pentingnya sebuah pendidikan karakter ini Presiden Joko Widodo bahkan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kemudian menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan perlibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pada pasal 2 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai relegius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu relegiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Penerapan kebijakan pendidikan karakter ini sudah diterapkan diberbagai sekolah, salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan penguatan pendidikan karakter ini yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Watubangga yang terletak dikedcamatan watubangga, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dengan jumlah siswa 520 orang dengan jumlah laki-laki 251 dan jumlah perempuan 269, dengan jumlah siswa yang beragama islam 475 orang dengan klasifikasi 231 orang laki-laki dan 244 perempuan dan jumlah siswa yang beragama non muslim 45 orang dengan klasifikasi 17 orang laki-laki dan 28 orang perempuan serta jumlah guru 38

orang dengan 1 orang staf. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada 2 Agustus 2024 sekolah tersebut sudah menerapkan pendidikan karakter sejak 2018, dan sekolah ini memiliki program yaitu P5 (Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila) yaitu : Suara demokrasi, Gaya hidup berkelanjutan (season 1) dan Kewirausahaan (season 2).

Kemudian seperti yang telah tertuang pada Pasal 6 bagian b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu program pembiasaan berjabat tangan kepada guru ketika keluar kelas untuk menanamkan adab kepada yang lebih tua, melantunkan Asmaul Husna setiap hari sebelum memasuki ruang kelas, pembiasaan sholat dhuzur sebelum pulang sekolah bagi yang beragama islam, kemudian pendekatan berbasis kelas yang diatur pada Pasal 6 bagian a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal yang penerapan penguatan pendidikan karakter diintegrasikan dengan melalui setiap mata pelajaran. Namun penerapannya mendapatii masalah.

Pada pembiasaan berjabat tangan kepada guru ketika keluar kelas atau pada saat pulang sekolah masih mendapati siswa yang tidak mengindahkan pembiasaan ini walaupun lebih banyak yang melakukan dari pada yang tidak melakukan pembiasaan berjabat tangan. Mungkin beberapa siswa belum menyerap nilai-nilai apa yang sebenarnya terkandung dalam pembiasaan berjabat tangan ini dan belum melekat pada sebagian karakter atau kebiasaan siswa. Dampak dari tidak melakukan pembiasaan berjabat tangan yaitu menunjukkan sikap tidak hormat dan sopan santun siswa kepada guru atau yang lebih tua.

Pembiasaan salat Zuhur di Masjid At-Tarbiyah yang berlokasi di lingkungan SMA Negeri 1 Watubangga masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dari total 520 siswa, terdapat 475 siswa yang beragama Islam dan 45 siswa non-Muslim. Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan pembiasaan salat Zuhur berjamaah umumnya diikuti oleh siswa dari sekitar tujuh hingga delapan kelas. Namun demikian, setiap harinya masih terdapat sekitar satu hingga dua kelas yang belum sepenuhnya melaksanakan salat berjamaah, dengan jumlah siswa yang tidak mengikuti berkisar antara 7 hingga 15 orang per kelas. Salah satu faktor penyebabnya ialah keterbatasan sarana air wudhu yang belum memadai untuk menampung seluruh kebutuhan siswa pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pembiasaan sholat belum menyerap menjadi kebiasaan atau karakter siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Dampak dari tidak melakukan pembiasaan sholat dhuzur berjamaah disekolah yaitu berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa dalam melaksanakan sholat dhuzur berjamaah, dapat menghambat kemampuan efektif (sikap) siswa dalam pelajaran agama islam serta dapat menghambat perilaku keagamaan siswa.

Untuk pembiasaan disiplin terdapat beberapa masalah Dari hasil rekapitulasi guru bk dari tahun 2022 sampai 2024 terdapat beberapa kejadian diantaranya pada tahun 2022-2023 terdapat siswa yang ketahuan merokok 3 kejadian kemudian pada tahun 2023-2024 terdapat siswa yang ketahuan merokok sebanyak 9 kejadian, sehingga dari tahun 2022-2024 terjadi peningkatan siswa yang ketahuan merokok sebanyak 9 kejadian dari 3 kejadian ditahun sebelumnya. Kemudian kasus yang kedua adalah lompat pagar pada tahun 2022-2023 terdapat siswa yang melompat pagar sebanyak 3 kejadian, kemudian pada tahun 2023-2024 terdapat 11 kejadian siswa yang melompat pagar, sehingga dari tahun 2022-2024 terdapat kenaikan kasus siswa yang melompat pagar. Jadi ada kenaikan kasus dari tahun 2022-2024.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait evaluasi kebijakan penguatan pendidikan karakter, melalui penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMA Negeri 1 Watubangga”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMA Negeri 1 Watubangga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang

menganut aliran fenomenologis yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*Describing*) dan pemahaman (*Understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya (Auliya et al., 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan data menggunakan triangulasi oleh karena itu maka diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi bermakna silang yaitu menggandakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkandari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lainnya dan pengecekan kembali pada waktu yang berbeda. Menurut William dalam (Sugiyono, 2013). Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah triangulasi sumber. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dengan penelusuran data primer dan skunder. Data primer berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari sumber kepustakaan atau dokumen yang berasal dari primer, sekunder dan tersier.

Narasumber dari penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, siswa SMA Negeri 1 WATUBANGGA dan orang tua siswa. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki integritas. Kebijakan ini secara nasional diterapkan melalui berbagai pendekatan pembelajaran dan pembiasaan sikap di lingkungan sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Watubangga, sebagai lembaga pendidikan formal di wilayah Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

Kebijakan penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Watubangga dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik melalui integrasi dalam mata pelajaran, pembiasaan sikap dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikannya di masa mendatang.

Adapun hasil evaluasi berdasarkan indikator *keefektivitasan* kebijakan penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Watubangga sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat perubahan positif dalam perilaku siswa, seperti menurunnya kasus perundungan dan meningkatnya kedewasaan dalam bersikap. Namun, implementasi program ini masih perlu diperkuat secara menyeluruh, terutama dengan melibatkan lingkungan keluarga dan konsistensi pengawasan terhadap sikap siswa di luar jam sekolah., *efesiensi* pelaksanaan kebijakan masih menjadi kendala. Kegiatan tidak dirancang secara interaktif atau terintegrasi, melainkan hanya disampaikan satu arah sehingga siswa merasa tidak terlibat secara aktif. Akibatnya, kebijakan justru dinilai mengganggu kegiatan belajar, *kecukupan* kebijakan PPK masih belum terpenuhi secara optimal dari sudut pandang peserta didik. Kegiatan yang bersifat formal dan kurang terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sekolah sehari-hari membuat program ini belum mampu menjangkau perubahan perilaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi, konsistensi, serta keteladanan dari guru dan lingkungan sangat dibutuhkan agar pembentukan karakter dapat berjalan dengan lebih cukup dan efektif. *kesamaan* pemerataan belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter di sekolah. Masih terdapat kecenderungan perhatian lebih terhadap siswa aktif, sementara siswa yang cenderung pasif atau mengalami kesulitan belum mendapatkan perhatian yang setara. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret yang melibatkan seluruh siswa dalam program pendidikan karakter, disertai dengan pengawasan dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan guru, wali kelas, dan orang tua, agar tidak ada siswa yang terpinggirkan dalam proses pembinaan karakter, *ketanggapan* ketanggapan kebijakan PPK di SMA Negeri 1

Watubangga masih dinilai rendah oleh para siswa. Program dinilai masih terlalu normatif dan belum kontekstual. Kebutuhan terhadap kebijakan yang adaptif dan humanistik sangat ditekankan, terutama dalam mendukung perkembangan karakter siswa secara utuh di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan *ketepatan* Untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, diperlukan upaya perbaikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dengan melibatkan siswa secara aktif. Program harus lebih kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan psikososial siswa, dan dilakukan secara berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap perubahan perilaku dan pembentukan karakter siswa secara menyeluruh.

Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Watubangga diharapkan dapat berjalan secara optimal dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan kepribadian yang baik. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan degradasi moral serta pengaruh negatif perkembangan zaman di kalangan pelajar.

1. Efektifitas

Pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Watubangga menunjukkan kemajuan signifikan meskipun belum mencapai hasil optimal. Kepala Sekolah melaporkan bahwa tingkat keberhasilan program telah mencapai sekitar 80 %, ditandai dengan menurunnya kasus pelanggaran serta sekolah kini dikategori “berkemajuan” dalam dua tahun terakhir. Data dari Guru BK memperkuat temuan ini, di mana kasus perundungan menurun drastis hingga nol dalam dua tahun terakhir. Temuan ini mencerminkan bahwa integrasi nilai karakter dalam kegiatan formal maupun ekstrakurikuler memiliki efek positif dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan Hidayati et al (2020) yang menunjukkan bahwa integrasi karakter dalam kurikulum dan kegiatan sekolah terbukti meningkatkan sikap positif dan mengurangi perilaku menyimpang pada siswa.

Namun, perubahan karakter siswa masih bersifat parsial dan memerlukan proses lanjutan, terutama karena pembentukan karakter tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan sosial. Wakil Kepala Sekolah dan Guru Agama menyoroti bahwa meskipun terlihat peningkatan kedewasaan dan tata krama, pembentukan karakter secara menyeluruh masih terhambat oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan media sosial sehingga efektivitas pendidikan karakter sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan keterlibatan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfiasari et al (2016) mengungkapkan bahwa pentingnya integrasi antara keluarga dan sekolah untuk memperkuat karakter remaja terutama pada jenjang sekolah.

Terdapat kesenjangan persepsi antara pihak sekolah dan siswa/orang tua tentang efektivitas program. Orang tua seperti Ibu Hasnawati dan Ibu Wa Hikmah menilai implementasi belum menyentuh semua siswa secara menyeluruh, yang mengindikasikan perlunya pendalaman program. Sebagian siswa juga mengungkapkan bahwa kegiatan pendidikan karakter masih bersifat formalitas, tidak diikuti pendampingan rutin dan pembudayaan penuh. Asri & Deviv (2023) dalam penelitian terbaru mereka menemukan bahwa efektivitas program karakter menurun karena kurangnya pemantauan orang tua dan pelaksanaan yang sporadis di sekolah.

2. Efisiensi

Efisiensi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) terlihat dari strategi pemanfaatan sumber daya internal secara bijak. Kepala Sekolah menyebutkan bahwa regulasi dan pembagian tupoksi antar warga sekolah guru, wali kelas, komite, dan siswa memungkinkan pelaksanaan program tanpa penambahan beban biaya. Sumber dana kinerja pun digunakan untuk pelatihan guru (in-house training), menunjang kapasitas internal tanpa menambah alokasi anggaran baru. Temuan ini selaras dengan studi oleh Luqman et al (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada. artinya optimalisasi kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dapat meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban finansial baru. Ini mendukung situasi di SMA 1 Watubangga, di mana insentif telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas guru tanpa memerlukan anggaran eksternal tambahan.

Kendala efisiensi muncul dari perencanaan yang kurang matang dan minimnya komunikasi dengan orang tua, ditambah regulasi disiplin yang ketat karena HAM/KPAI. Orang tua, seperti Ibu Hasnawati dan Wa Hikmah, menilai keberadaan program masih sporadis, tidak transparan, dan minim pelaporan, sehingga mereka merasa sulit mendukung dari rumah. Kondisi ini sangat mirip dengan hasil penelitian Hakim et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa efisiensi pendidikan karakter di sekolah sering terganggu oleh kurangnya keterlibatan orang tua dan perencanaan yang kurang sistematis. Ini menandakan bahwa meski strategi internal sudah baik, tanpa sistem evaluasi dan komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua, efisiensi program belum dapat dimaksimalkan.

3. Kecukupan

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), kecukupan berkaitan dengan apakah seluruh unsur karakter siswa telah terbina secara menyeluruh dan menyentuh semua lapisan peserta didik. Jika program dianggap belum mencukupi, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan, strategi, serta cakupan pelibatan pihak terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Ilham et al (2022) kecukupan dalam pendidikan karakter sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum formal, peran guru, dan partisipasi aktif keluarga, di mana ketiganya harus berjalan selaras agar hasil program terasa secara menyeluruh di kalangan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Watubangga, terlihat bahwa sekolah telah mengembangkan pendekatan karakter melalui jalur pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan penguatan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan kebhinekaan. Namun demikian, pernyataan kepala sekolah bahwa sekolah masih “menunggu hasilnya” dan penilaian guru BK serta wakil kepala sekolah bahwa masih dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan kepada orang tua menunjukkan bahwa hasil kebijakan belum sepenuhnya mencukupi. Implementasi pendidikan karakter di banyak sekolah belum mencukupi karena minimnya sistem monitoring dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam program pembinaan karakter di luar sekolah (Hakim et al., 2024). Dengan demikian, walaupun program telah disusun secara struktural, namun realisasinya belum sepenuhnya menjangkau seluruh siswa.

4. Kesamaan

Kesetaraan dalam evaluasi kebijakan pendidikan karakter merujuk pada sejauh mana seluruh siswa, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, gender, atau akademik, mendapatkan akses, layanan, dan manfaat yang setara dari program tersebut. Komponen kunci mencakup penyediaan pembinaan karakter, informasi program, dan kesempatan partisipasi secara adil dan merata baik di kelas formal, kegiatan ekstrakurikuler, maupun layanan bimbingan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah dan Guru BK berkomitmen untuk memastikan seluruh siswa mendapat layanan yang sama dalam pembinaan karakter. Meskipun demikian, data wawancara orang tua dan siswa mengungkapkan bahwa perhatian lebih sering tertuju pada siswa yang aktif seperti peserta OSIS atau yang berprestasi. Hal ini sesuai dengan Sugiri (2025) yang menunjukkan bahwa pembinaan karakter efektif di sekolah inklusif ketika nilai-nilai karakter diinternalisasi melalui pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan yang melibatkan seluruh siswa, bukan hanya sebagian saja.

5. Ketanggapan

Ketanggapan adalah seberapa cepat dan tepat suatu kebijakan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi penerima manfaatnya. Di SMA Negeri 1 Watubangga, responsivitas kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) terlihat melalui sejumlah strategi proaktif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, terdapat upaya untuk merespons setiap kebutuhan siswa melalui penyediaan sarana, ekskul, dan penggunaan dana yang sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan mereka. Guru BK juga menerapkan prosedur bimbingan berkelanjutan mengatur aturan dan menindaklanjuti pelanggaran secara berulang untuk

memastikan penanganan masalah karakter dilakukan secara adaptif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Mulyatno (2022) yang menyatakan bahwa peran guru BK sangat vital dalam responsivitas PPK, dengan meningkatnya kemampuan mereka dalam menangani konflik karakter dan psikologis siswa secara intensif melalui dialog dan konseling rutin.

Meski demikian, temuan dari orang tua dan siswa menunjukkan responsivitas program masih kurang memadai. Ibu Wa Hikmah dan Ibu Fatimah menyoroti minimnya platform diskusi dua arah dan adaptasi program terhadap kebutuhan emosional atau sosial siswa. Dengan demikian, meski kebijakan PPK di sekolah telah menunjukkan responsifitas internal yang baik melalui sarana, prosedur BK, dan dana yang terarah namun respons luar dari siswa dan orang tua menunjukkan masih adanya kekosongan dalam mendengar aspirasi. Untuk meningkatkan responsivitas ke depan, sekolah perlu menerapkan forum dialog, menyelenggarakan survei kebutuhan siswa, dan menyediakan ruang bagi siswa agar aktif berkontribusi dalam merancang PPK yang lebih kontekstual, serta konsisten dalam evaluasi dan tindak lanjut program.

6. Ketepatangunaan

Ketepatangunaan kebijakan PPK dalam merespons kebutuhan nyata dan tantangan antarsiswa secara kontekstual. Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa program difokuskan pada indikator seperti iklim belajar, kenyamanan, dan survei harian agar sifat karakter yang fluktuatif dapat tertangani secara berkelanjutan. Namun, Guru BK dan Wakil Kepala Sekolah menegaskan bahwa meski prosedur sudah sesuai, hasil ketepatangunaannya belum optimal karena dukungan orang tua dan dinamika karakter siswa yang tidak stabil masih menjadi kendala.

Program terlalu umum dan tidak menyoroti masalah karakter krusial seperti disiplin dan tanggung jawab evaluasi dari orang tua juga belum dijalankan secara formal. Siswa pun menyatakan bahwa kebijakan masih dianggap seremonial, banyak yang tidak memahami tujuan kegiatan karakter hal ini kurangnya kejelasan tujuan dan komunikasi dua arah orang tua dan guru yang mengurangi persepsi ketepatangunaan PPK (Yulianto et al., 2020)

Dari sudut pandang orang tua dan siswa, ketepatangunaan dinilai masih rendah. Orang tua menyatakan kebijakan belum terfokus pada isu-isu utama seperti kedisiplinan dan tanggung jawab, Solusi yang direkomendasikan oleh para informan yaitu peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan dan evaluasi program serta pelaksanaan kegiatan yang kontekstual dan berkelanjutan sejalan dengan rekomendasi Literatur Peya Nia Do et al (2024) yang menegaskan pentingnya dialog dan monitoring terus-menerus agar program karakter dapat tepat guna dan berdampak bagi siswa secara utuh.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada hasil penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Watubangga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dalam membentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka dan PMR), tetapi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka semakin kesini semakin kurang minat siswa untuk mengikuti karena ada isu-isu yang simpang siur tentang kegiatan perkemahan dan program keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara implementasi di sekolah dengan amanat kebijakan nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan PPK pada satuan pendidikan formal.

Namun, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, ketanggapan, dan ketepatangunaan), ditemukan bahwa implementasi kebijakan PPK di SMA Negeri 1 Watubangga belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan sebagaimana tertuang dalam regulasi dengan realitas pelaksanaannya di sekolah.

Secara umum, program PPK telah a. efektif dalam aspek keterlibatan guru, pengadaan kegiatan karakter, serta sinergi antar pihak sekolah. Akan tetapi, b. efisiensi pelaksanaan masih terkendala oleh minimnya koordinasi dan partisipasi orang tua. Dari segi c. kecukupan dan d. ketanggapan, program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik siswa secara merata. Dalam indikator e. kesetaraan dan f. ketepatangunaan, kebijakan masih cenderung menyoroti

sebagian siswa tertentu saja, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan siswa secara adil dan menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tujuan penelitian dengan judul yang diangkat, yakni Evaluasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Watubangga. Penelitian ini membuktikan bahwa meskipun implementasi PPK di sekolah sudah berlandaskan regulasi yang berlaku, yaitu Perpres No. 87 Tahun 2017 dan Permendikbud No. 20 Tahun 2018, kebijakan tersebut tetap membutuhkan penguatan lebih lanjut agar benar-benar mampu memberikan dampak pembentukan karakter yang signifikan, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh peserta didik.

REFERENSI

- Alfiyari, A., Hastuti, D., & Sarwoprasodjo, S. (2016). An Integration of Family and School on Strengthening the Character of Teenager in Indonesia: It's a Must. *Journal of Child Development Studies*, 1(01), 13. <https://doi.org/10.29244/jcds.1.01.13-26>
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Abadi (ed.)).
- Elisanti. (2021). pendidikan karakter. In m. ivan ariful Fathoni (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (1st ed.). 1 januari 2021. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hp/journals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educ>
- Hakim, A., Syahril, S., & Abun, A. R. (2024). Peran Guru dan Manajemen Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter di SDIT Jaringan Sekolah Islam Terpadu Kota Bandar Lampung. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001), 1113–1122.
- Hidayati, N. A., Waluyo, H. J., Winarni, R., & Suyitno. (2020). Exploring the implementation of local wisdom-based character education among indonesian higher education students. *International Journal of Instruction*, 13(2), 179–198. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13213a>
- Mulyatno, C. B. (2022). Peranan Bimbingan dan Konseling Dalam Pembentukan Karakteristik Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Peya Nia Do, A. T., Nurhattati, N., & Kamaludin, K. (2024). Evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler: Systematic Literature Review. *Journal on Education*, 7(2), 8825–8833. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7781>
- Rifma. (2020). Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v5i1.3498>
- Setiawan, F., Taufiq, W., Puji Lestari, A., Ardianti Restianty, R., & Irna Sari, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 62–71. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>
- Sugiri, A. (2025). *Pendidikan Karakter : Karakter Siswa di Sekolah Inklusif*. 9, 7664–7672.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Suryawan. (2016). Cegah Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(1), 64. <https://doi.org/10.25078/jpm.v2i1.62>
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 192–204. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290>